



Legitimasi Kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Ditinjau dari Tipologi Kekuasaan Max Weber

Virnanda Septiana Putri^{1*}, Yuyun Sri Wahyuni²

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email@virnanda1750fishipol.2023@student.uny.ac.id

Jl.. Colombo Nomor 1, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract.

Surabaya, as one of the largest metropolitan cities in Indonesia with complex government dynamics, requires legitimacy to maintain social stability, policy effectiveness, and public trust. The emergence of this perspective has necessitated a study that discusses legitimacy in government. Therefore, this study was conducted with the aim of analyzing the legitimacy of the power of the Surabaya City Regional Government through the perspective of Max Weber's typology of power, which includes traditional, charismatic, and rational-legal legitimacy. By using a literature study method of regional regulations, official government documents, and previous research results, this study reveals that the legitimacy of the Surabaya City Government is primarily based on rational-legal power through a structured bureaucratic system, the implementation of regulation-based policies, and public administration accountability. However, the charismatic element of regional leaders also strengthens public trust through closeness to the community, service innovation, and a reputation for responsive leadership. Traditional legitimacy, however, plays a smaller role, but remains evident in local values and culture that influence government communication patterns with citizens. Overall, this study demonstrates that the combination of dominant rational-legal legitimacy and charismatic leadership support plays a significant role in maintaining power stability and increasing government effectiveness in the city of Surabaya. These results are expected to serve as a reference for understanding the dynamics of local government legitimacy in Indonesia's socio-political context.

.Keywords: *Legitimacy, government, City of Surabaya*

Abstrak

Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan dinamika pemerintahan yang kompleks, memerlukan yang namanya legitimasi untuk menjaga stabilitas sosial, efektivitas kebijakan, serta kepercayaan publik. Munculnya pandangan tersebut membuat perlu adanya kajian yang membahas mengenai legitimasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui perspektif tipologi kekuasaan Max Weber, yang meliputi legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional-hukum. Dengan menggunakan metode studi literatur terhadap regulasi daerah, dokumen resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu, kajian ini mengungkapkan bahwa legitimasi Pemerintah Kota Surabaya terutama bertumpu pada kekuasaan rasional-hukum melalui sistem birokrasi yang terstruktur, penerapan kebijakan berbasis regulasi, serta akuntabilitas administrasi publik. Meski demikian, unsur karismatik pemimpin daerah turut memperkuat kepercayaan publik melalui kedekatan dengan masyarakat, inovasi pelayanan, dan reputasi kepemimpinan yang responsif. Adapun legitimasi tradisional berperan kecil, namun tetap tampak dalam nilai-nilai lokal dan budaya yang memengaruhi pola komunikasi pemerintahan dengan warga. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perpaduan antara legitimasi rasional-hukum yang dominan dan dukungan karismatik pemimpin berperan penting dalam mempertahankan stabilitas kekuasaan serta meningkatkan efektivitas pemerintahan di Kota Surabaya. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memahami dinamika legitimasi pemerintah daerah dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Kata kunci: Legitimasi, pemerintah, Kota Surabaya

Received: November 12, 2025; Revised: November 18, 2025; Accepted: August 27, 2024; **Online**

Available: November 29, 2025; **Published:** November 29, 2025;

*Corresponding author, e-mail address

1. LATAR BELAKANG

Legitimasi merupakan konsep dalam suatu kekuasaan yang merujuk pada proses penerimaan sosial atas kewenangan yang dimiliki pemimpin maupun institusi tertentu terhadap keputusan dan kebijakan yang ada sehingga legitimasi tersebut dapat dianggap sah untuk diikuti dan dipatuhi bersama. Dalam konteks pemerintahan daerah, legitimasi terbentuk dari kombinasi prosedur formal seperti pemilihan kepala daerah, praktik administratif, maupun berbagai aturan lainnya yang mencakup tata kelola kota. Singkatnya, legitimasi daerah merupakan hasil dari otoritas hukum formal berdasarkan persetujuan maupun dukungan masyarakat yang dijalankan secara demokratis dan bertanggung jawab. Tanpa adanya dukungan, kepercayaan, maupun norma sosial atau aturan tertentu dari pemerintah, legitimasi tidak akan berjalan dengan baik.

Legitimasi yang kuat berasal dari dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang diwujudkan melalui proses demokrasi seperti pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partisipasi rakyat terhadap kebijakan tersebut merupakan bentuk kedaulatan yang akan memberikan kekuasaan secara sah. Dasar kekuasaan yang sah dan diakui oleh rakyat tertuang dalam prinsip kedaulatan rakyat. Di Indonesia, prinsip mengenai kedaulatan rakyat ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pada Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Berdasarkan peraturan tersebut, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, pelaksanaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang mengenai pemerintah daerah dan juga dengan melalui lembaga-lembaga negara yang dipilih secara demokratis seperti Presiden, DPR, DPD. Dengan demikian, landasan utama bagi kekuasaan yang sah dan diakui oleh rakyat di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang diimplementasikan melalui mekanisme demokrasi dan diatur dalam UUD 1945. Hal ini menjadi bukti bahwa legitimasi sangat berarti dalam pemerintahan.

Beberapa daerah di Indonesia harus mempunyai legitimasi yang kuat, salah satunya kota Surabaya. Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan dinamika pemerintahan yang kompleks, memerlukan yang namanya legitimasi

untuk menjaga stabilitas sosial, efektivitas kebijakan, serta kepercayaan publik. Legitimasi pemerintah kota dibangun melalui perpaduan antara legitimasi legal-rasional, legitimasi kinerja, dan legitimasi partisipatif. Ketiga legitimasi ini harus ada dalam memperkuat kepercayaan publik. Seperti pada teorinya Max Weber, beliau membagi legitimasi dalam tiga hal yaitu tradisional, kharismatik dan legal-rasional yang didasarkan pada dasar kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, variasi bentuk kekuasaan dalam sejarah, serta bagaimana kekuasaan dipertahankan dalam konteks modern maupun tradisional. Ketiga hal tersebut menjadi kerangka penting dalam memahami politik, pemerintahan, dan hubungan kekuasaan yang masih relevan hingga saat ini.

Secara legal-rasional, pemerintah Kota Surabaya memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokrasi elektoral yang kompetitif berdasarkan pemilihan kepala daerah (Pilkada), di mana wali kota dan wakil wali kota dipilih langsung oleh masyarakat. Proses ini memberikan dasar hukum dan konstitusional bagi pemerintah kota untuk menjalankan kewenangannya. Selain itu, keberhasilan Surabaya dalam berbagai indikator pembangunan seperti peningkatan kualitas pada layanan publik, tata kelola pemerintahan, serta keberhasilan program lingkungan dan infrastruktur semakin memperkuat legitimasi kinerjanya di mata masyarakat. Kepemimpinan wali kota dan tata kelola pemerintahan kota mempunyai peran sentral dalam membangun legitimasi, sebagai performa dalam meningkatkan kebijakan publik yang langsung dirasakan oleh warga.

Dengan demikian, esai ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis sumber-sumber legitimasi pemerintahan Kota Surabaya yang merujuk pada tipologi kekuasaan Max Weber berdasarkan sistemnya yang tradisional, kharismatik dan legal-rasional. Pada esai ini nantinya akan mengkajikan beberapa indikator-indikator legitimasi seperti dasar konstitusional dan proses pemilihan (legal-rasional), figur kepemimpinan dan daya tarik personal (kharismatik), serta praktik dan nilai sosial yang lama (tradisional), serta peran modernisasi birokrasi dan e-government sebagai pendorong legitimasi legal-rasional yang ada di Kota Surabaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Legitimasi dalam kajian politik merupakan fondasi bagi keberlangsungan kekuasaan dan efektivitas pemerintahan. Max Weber (1947) mendefinisikan legitimasi sebagai keyakinan masyarakat bahwa otoritas yang memerintah memiliki hak yang sah untuk menjalankan kekuasaan. Weber juga membagi legitimasi ke dalam tiga tipe utama: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Ketiga tipologi ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana kekuasaan diterima oleh masyarakat, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah yang kompleks. Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagai entitas birokratis modern memiliki struktur kelembagaan yang diatur oleh sistem hukum nasional, namun tetap dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat Jawa Timur. Hal ini menjadikan teori Weber sangat relevan dalam menganalisis dinamika legitimasi pemerintahan kota tersebut.

Legitimasi tradisional bersandar pada kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang terwariskan. Meskipun struktur pemerintahan Kota Surabaya tidak bertumpu pada otoritas tradisional seperti kerajaan, akan tetapi masih adanya unsur tradisi yang tetap memengaruhi pola hubungan pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1994), kultur Jawa Timur memiliki karakter egaliter, tegas, dan partisipatif, yang berpengaruh dalam persepsi masyarakat terhadap pemimpin. Beberapa penelitian terdahulu, misalnya oleh Rahmawati (2019), menunjukkan bahwa nilai lokal seperti gotong royong dan solidaritas sosial menjadi modal bagi penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi tradisional tetap hadir sebagai faktor pendukung meskipun bukan yang utama.

Selanjutnya ada legitimasi karismatik yang didasarkan pada kualitas personal pemimpin yang dianggap inspiratif, visioner, dan memiliki daya pikat sosial. Weber menekankan bahwa karisma muncul dari persepsi masyarakat, bukan sekadar atribut objektif. Dalam konteks kepemimpinan lokal, penelitian oleh Rachman & Sihombing (2020) menegaskan bahwa gaya kepemimpinan karismatik meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat implementasi kebijakan. Surabaya memiliki sejarah kepemimpinan daerah yang dikenal kuat secara karismatik, misalnya pada masa Tri

Rismaharini. Studi oleh Haris (2021) menemukan bahwa kedekatan pemimpin dengan warga, komunikasi langsung, serta keberhasilan inovasi publik dalam pengelolaan kota menjadi faktor penting yang membangun legitimasi karismatik pemimpin daerah.

Legitimasi rasional-legal merupakan bentuk legitimasi paling dominan dalam pemerintahan modern. Otoritas diperoleh melalui aturan hukum, prosedur birokrasi, dan regulasi formal yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga. Weber menyatakan bahwa tipe legitimasi ini menjadi dasar dari sistem administrasi modern yang berorientasi pada efisiensi dan legalitas. Dalam konteks Kota Surabaya, regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya, serta mekanisme pelayanan publik yang terstandardisasi menjadi pilar legitimasi rasional-legal. Penelitian oleh Febrianto (2022) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, transparansi anggaran, dan penguatan akuntabilitas birokrasi memperkuat legitimasi rasional-legal melalui peningkatan kepercayaan publik.

Dengan demikian, legitimasi kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur rasional-legal yang kuat, dukungan karismatik pemimpin, serta nilai tradisional masyarakat setempat. Kerangka teori Max Weber memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah memperoleh, mempertahankan, dan memperkuat legitimasi di mata masyarakat. Penelitian-penelitian terdahulu semakin menegaskan bahwa legitimasi tidak bersifat tunggal, tetapi multidimensi dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik lokal. Integrasi antara birokrasi modern, budaya lokal, dan kualitas kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi kekuasaan pemerintahan di Kota Surabaya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis legitimasi kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya berdasarkan tipologi kekuasaan Max Weber. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam, sistematis, dan interpretatif mengenai konsep legitimasi politik serta dinamika kekuasaan dalam konteks pemerintahan daerah. Metode ini menekankan pemahaman terhadap fenomena melalui kata-kata, konsep, dan pemaknaan yang terdapat dalam berbagai sumber

literatur, bukan melalui perhitungan statistik. Teknik studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, teori Max Weber, kepemimpinan daerah, dan pemerintahan Kota Surabaya. Proses pengumpulan data meliputi tahap: (1) identifikasi topik dan kata kunci, (2) pencarian sumber melalui database seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, dan repositori perguruan tinggi, (3) seleksi sumber berdasarkan relevansi, kebaruan, dan kredibilitas, serta (4) pengorganisasian temuan untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu proses menginterpretasi dan mengorganisasi materi literatur untuk mengidentifikasi pola, konsep utama, serta temuan-temuan teoretis yang berhubungan dengan legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk menggambarkan bagaimana tipologi kekuasaan Weber diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Kota Surabaya. Selanjutnya, keabsahan data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi dan meminimalkan bias interpretatif. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya terbentuk melalui kombinasi tiga tipologi legitimasi Max Weber, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang letaknya di paling utara. secara geografis, kota Surabaya terletak di 7°9'-7°21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 54' Bujur Timur. Kota ini berbatasan langsung dengan Selat Madura di utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di selatan, dan Kabupaten Gresik di barat. Kota dengan luas 33.306,30 Hal ini sering disebut juga sebagai kota pahlawan, mengingat kisah perjuangan rakyat membela kemerdekaan ada di kota ini. Secara administratif, Surabaya dibagi menjadi 160 kelurahan dan 31 kecamatan yang terbagi ke dalam 5 wilayah dengan jumlah penduduknya berkisar 3.137.620 jiwa.

Kota ini merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan sebagainya yang telah membaaur dengan penduduk asli Surabaya. Beragamnya etnis di kota Surabaya, membuat kota ini sangat rawan akan adanya perselisihan baik dalam pemerintahan, pembuat kebijakan dan sebagainya yang berkaitan dengan pemerintahan. maka dari itu perlu adanya legitimasi yang kuat sebagai aturan yang sah dan diikuti oleh masyarakat disekitar guna tidak terjadi yang namanya konflik sosial.

Berdasarkan pada tipologi kekuasaan oleh Max Weber, Legitimasi yang kuat didasarkan pada tiga hal yakni legitimasi kharismatik, tradisional dan legal-rasional. Legitimasi legal rasional menjadi fondasi legitimasi di Surabaya yang wujudnya dapat dilihat saat adanya pemilihan kepala daerah, pembuatan aturan perundang-undangan daerah, dan birokrasi formal yang menata proses pembuatan kebijakan. Penetapan pasangan wali kota yang terpilih melalui pemilihan umum lokal serta legitimasi formal administrasi publik menunjukkan bahwa asal-usul kewenangan di Surabaya berada pada ranah aturan dan prosedur yang diakui. Selain itu, kehadiran perangkat administrasi yang rutin dalam pemerintahan juga bisa memperkuat citra pemerintahan legal-rasional. Pada pilkada 2024 di Surabaya, terjadi fenomena menarik dimana adanya calon tunggal yang mencalonkan diri sebagai walikota Surabaya. Calon tunggal tersebut bernama Eri-Armuji. Meskipun telah ditetapkan sebagai calon tunggal, paslon akan tetap melawan kotak kosong. Hal tersebut menjadikan bahwa legitimasi ditegakkan dalam pemilihan.

Temuan literatur terkait legitimasi di Kota Surabaya memperlihatkan bahwa legitimasi rasional-legal merupakan dasar yang paling dominan dalam struktur pemerintahan modern di Surabaya, sementara legitimasi karismatik dan tradisional berperan sebagai faktor penguat yang memperbesar penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dominasi legitimasi rasional-legal terlihat dari sistem birokrasi Kota Surabaya yang berjalan berdasarkan ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme tata kelola pemerintahan. Struktur administrasi yang profesional, penerapan e-government, transparansi pengelolaan anggaran, serta mekanisme pelayanan publik berbasis teknologi menjadi

bukti bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengandalkan sistem hukum formal sebagai landasan legitimasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber bahwa legitimasi rasional-legal merupakan tipe otoritas yang stabil berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan secara resmi.

Meskipun demikian, unsur legitimasi karismatik juga memegang peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan literasi penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Wali Kota Surabaya baik pada saat ini yang dipimpin oleh Eri Cahyadi maupun sebelumnya cenderung memiliki karakter kepemimpinan responsif, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat.

Gaya kepemimpinan yang aktif turun ke lapangan, cepat merespons keluhan warga, serta konsisten menghadirkan inovasi kebijakan membuat pemimpin Surabaya sering dipersepsikan sebagai figur karismatik yang mampu menginspirasi dan memberikan rasa percaya. Weber menyatakan bahwa legitimasi karismatik muncul dari persepsi publik atas kualitas luar biasa pemimpin, dan hal ini tercermin pada tingginya dukungan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan di Surabaya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan ruang publik yang nyaman, mengelola lingkungan hidup, dan memperbaiki kualitas layanan publik tidak hanya bergantung pada struktur hukum birokratis, tetapi juga pada kemampuan pemimpin membangun hubungan emosional dengan warga.

Sementara itu, legitimasi tradisional meskipun bukan fondasi utama, tetap hadir secara implisit dalam hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat Surabaya. Nilai-nilai budaya Jawa Timur seperti keterbukaan, keberanian berbicara, solidaritas, dan gotong royong memengaruhi pola komunikasi sosial dan politik di tingkat lokal. Pemerintah Kota Surabaya banyak memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas, kampung, dan organisasi warga dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tradisional membantu memperkuat legitimasi kekuasaan melalui kesesuaian antara nilai budaya masyarakat dan pola kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan keseluruhan hasil temuan literatur, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya terbentuk melalui integrasi

ketiga tipe legitimasi Weber: rasional-legal sebagai struktur utama yang memberikan fondasi hukum atas kewenangan pemerintah; karismatik sebagai penguat kepercayaan dan mobilisasi partisipasi masyarakat; serta tradisional sebagai unsur pendukung yang menjaga keharmonisan sosial dan kesesuaian nilai lokal. Sinergi ketiganya membuat Pemerintah mampu mempertahankan stabilitas kekuasaan, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Pendekatan legitimasi hibrid ini menjadi karakter penting yang menandai pemerintahan daerah modern yang tidak hanya bertumpu pada aturan formal, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan kedekatan budaya dengan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi literatur, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kekuasaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya merupakan hasil integrasi dari tiga tipologi legitimasi Max Weber, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Legitimasi rasional-legal menjadi fondasi utama karena pemerintahan kota beroperasi dalam kerangka hukum formal yang jelas, terstandarisasi, dan berbasis aturan yang berlaku secara nasional maupun daerah. Struktur birokrasi yang profesional, transparansi pengelolaan kebijakan publik, serta inovasi pelayanan menjadi bukti kuat bahwa otoritas pemerintah daerah terutama diperoleh melalui sistem hukum yang sah. Di sisi lain, legitimasi karismatik berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik melalui figur pemimpin yang responsif, komunikatif, dan memiliki rekam jejak inovatif. Kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat menjadikan proses penerimaan kebijakan lebih mudah dan efektif. Sementara itu, legitimasi tradisional turut memberi warna melalui nilai-nilai budaya lokal masyarakat Surabaya seperti gotong royong, keterbukaan, dan solidaritas yang memperkuat hubungan sosial antara pemerintah dan warga. Secara keseluruhan, keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh legitimasi kekuasaan terletak pada kemampuan menggabungkan ketiga tipe legitimasi tersebut sehingga menghasilkan pemerintahan yang stabil, dipercaya, dan didukung oleh masyarakat.

6. SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Surabaya terus memperkuat legitimasi rasional-legal melalui peningkatan transparansi, profesionalisme birokrasi, serta inovasi layanan publik berbasis teknologi yang mempermudah akses masyarakat. Selain itu, kepemimpinan daerah perlu mempertahankan aspek karismatik yang tercermin dalam komunikasi aktif, keterlibatan langsung di lapangan, serta kemampuan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan empatik. Pemerintah juga perlu menjaga dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pendekatan sosial untuk memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat. Integrasi ketiga aspek ini hukum, kepemimpinan, dan budaya diharapkan dapat memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintah daerah secara berkelanjutan, meningkatkan partisipasi publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin inklusif, adaptif, dan demokratis di Kota Surabaya.

DAFTAR REFERENSI

- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.
- Karinda, K. (2024). *Sosiologi Pemerintahan*. Diva Pustaka.
- Mulianto, B. *Struktur Legitimasi dalam Masyarakat Indonesia*. (kajian empiris dan teoritis tentang bagaimana nilai dan norma lokal mempengaruhi legitimasi), Jurnal Wedana, 2018.
- Sofyani, H. (2020) *The intervening role of information technology governance (case references to Indonesian local governments and e-government)*. (menganalisis peran TI dalam akuntabilitas pemerintahan daerah).
- Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, 5632.
- Novendra, H., Andri, S., & Yusri, A. (2024, December). Analisis Pengaruh Legitimasi Kepala Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi pada Masa Transisi Kepemimpinan 2022–2024. In *Prosiding Seminar Nasional*

Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 69-74).